



ANALISIS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PARIWISATA BERKELANJUTAN DI KOTA BANDUNG SELAMA PANDEMI COVID 19

Oleh

Violetta Simatupang¹⁾ & Sukmadi²⁾

^{1,2}Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung

Email: josephvioletta@gmail.com & ads.stpnhi@gmail.com

Abstrak

Pariwisata sebagai salah satu penggerak perekonomian dunia, memiliki peran positif dan negatif bagi keberlangsungan hidup alam. Penyebaran COVID-19 yang cepat mendorong pemerintah melakukan berbagai upaya penanggulangan penyebaran COVID-19. Implikasi dari kondisi tersebut berdampak langsung kepada industri pariwisata yang ada di Kota Bandung. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kota Bandung selama pandemi covid 19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Data sebagai sumber dasar analisis dalam penelitian ini didapat dengan menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi (*documentary study*). Data ini kemudian akan diolah melalui tiga tahapan yang terdiri dari reduksi data, penyajian data/display dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa sektor pariwisata yang terpuruk akibat pandemi Covid-19 tengah memasuki era normal baru. Pariwisata berkelanjutan akan menjadi sebuah konsekuensi dari bagian pengembangan pariwisata, setelah pandemi Covid-19 selesai. Kerja pariwisata berkelanjutan bukan hanya kerja sektoral, tapi harus menyeluruh baik masyarakat, pemerintah, akademisi dan lainnya, atau yang biasa disebut pentahelix.

Kata Kunci: Analisis Kebijakan, Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan & Covid-19

PENDAHULUAN

Pariwisata di Indonesia menurut Undang-Undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan pasal 1 (5) adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidangnya. Pariwisata sebagai salah satu penggerak perekonomian dunia, memiliki peran positif dan negatif bagi keberlangsungan hidup alam. Potensi keindahan dan kealamian alam, membuat setiap manusia yang mendatanginya akan selalu mendapat ketenangan serta kesejukan. Disisi lain, adanya manusia yang mendatangi, turut serta dalam eksploitasi kepada alam yang sudah terjaga secara alami serta sebagai habitat para penghuninya. Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang melanda dunia di tahun 2020 pada awalnya disikapi berbeda oleh pemerintah Indonesia, keyakinan bahwa COVID-19 tidak akan menyebar ke Indonesia memunculkan gagasan dari pemerintah Indonesia untuk memberikan insentif bagi sektor pariwisata

agar mampu meningkatkan kunjungan wisatawan asing ke Indonesia meskipun negara-negara ASEAN yang lainnya mulai menerapkan pembatasan kunjungan wisatawan ke negaranya (Sugianto, 2020).

Gagasan tersebut menjadi tidak terwujud ketika awal bulan Maret 2020 diketemukan kasus pertama warga negara Indonesia yang terinfeksi COVID-19. Hanya berselang satu bulan dari pengumuman tersebut, COVID-19 menyebar ke banyak kota di Indonesia yang mana korban meninggal mencapai ratusan orang dan bertambah setiap harinya seiring dengan bertambahnya jumlah orang yang terinfeksi COVID-19 (Yurianto, Pritasari, Wibowo, & Siswanto, 2020). Penyebaran COVID-19 yang cepat mendorong pemerintah melakukan berbagai upaya penanggulangan penyebaran COVID-19, salah satu upaya tersebut yaitu dengan ditetapkannya COVID-19 sebagai bencana nasional non-alam melalui Keppres 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-



alam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional. Implikasi dari ditetapkannya COVID-19 sebagai bencana alam yaitu kebijakan penanggulangan COVID-19 berada di pemerintah pusat beserta dengan pemerintah daerah yang mana setiap pemangku kepentingan harus tunduk dan taat kepada kebijakan penanggulangan COVID-19 tersebut.

Kota Bandung sebagai salah satu daerah yang memiliki kasus infeksi COVID-19 terbanyak di Provinsi Jawa Barat menerapkan berbagai kebijakan dalam upayanya menanggulangi penyebaran COVID-19 agar tidak meluas dan menginfeksi banyak masyarakat. Salah satu kebijakan yang berdampak langsung kepada sektor pariwisata yaitu adanya surat edaran Walikota Bandung Tertanggal 31 Maret 2020 Tentang Himbauan untuk Sementara Tidak Melaksanakan Kegiatan Operasional Jasa Usaha Pariwisata dalam Upaya Kewaspadaan Terhadap Penularan COVID-19. Dalam surat edaran tersebut tercantum 13 (tiga belas) jasa wisata yang tidak dapat melaksanakan kegiatan operasionalnya seperti bioskop, panti pijat sampai dengan area permainan anak, bahkan pemberhentian jasa usaha wisata berlaku juga bagi jasa usaha yang berada di lingkungan perhotelan.

Pemberhentian kegiatan operasional jasa wisata berdampak langsung kepada industri pariwisata di Kota Bandung, mengingat Kota Bandung merupakan salah satu kota tujuan wisata di Indonesia. Kondisi tersebut berlanjut ketika Kota Bandung ditetapkan sebagai daerah pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mana segala jenis aktivitas pariwisata secara tegas dilarang sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/259/2020.

Terhentinya sektor pariwisata tidak hanya terjadi di jenis wisata belanja dan wisata kuliner yang mana Kota Bandung sudah terkenal dengan jenis wisata tersebut, tetapi juga terhadap jenis wisata lainnya seperti wisata sejarah, wisata alam dan wisata budaya. Implikasi dari kondisi tersebut berdampak langsung kepada industri pariwisata yang ada di Kota Bandung. Kerugian

tidak hanya berdampak kepada penyelenggaraan pariwisata secara langsung, tetapi juga kepada sektor industri penunjang pariwisata seperti jasa transportasi/travel, hotel, dan lain sebagainya. Meskipun banyak pihak memprediksi bahwa COVID-19 bisa berlangsung sepanjang tahun 2020, akan tetapi kerugian bagi industri pariwisata sudah bisa dirasakan dampaknya pasca diberlakukannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Sektor pariwisata yang paling berimbas adalah perhotelan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bandung mengakui, sektor perhotelan terkena imbas wabah virus Corona. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bandung, Kenny Dewi Kaniyasi menjelaskan, angka hunian hotel di Kota Bandung mengalami penurunan drastis sejak wabah virus corona terjadi di berbagai negara. Menurut beliau, hingga saat ini tingkat hunian hotel di Kota Bandung hanya terisi sebesar 30 persen. Padahal, angka normal tingkat hunian hotel pada 2019 rata-rata mencapai 60 sampai 70 persen.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bandung tengah menyiapkan strategi guna mendorong pelaku industri pariwisata menggunakan konsep berkelanjutan (*sustainable tourism*), karena selain memiliki nilai kebermanfaatan ekonomi, pola pariwisata keberlanjutan memberi kontribusi langsung bagi kegiatan konservasi. Penerapan program *Sustainable Tourism for Development* (STDev) yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2016, tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan yang mengadopsi standar internasional dari *Global Sustainable Tourism Council* (GSTC). Implementasi pariwisata berkelanjutan adalah tugas yang sangat berat dan tak bisa dilakukan oleh pemerintah saja. Namun kelompok sadar wisata (pokdarwis) harus dilibatkan secara serius untuk membangun fondasi dan merealisasikan pariwisata berkelanjutan.

Untuk merealisasikan program pariwisata berkelanjutan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata



(Disbudpar) Kota Bandung akan membahas mengenai konsep ini bersama pihak yang terlibat dalam ekosistem industri pariwisata. Diantaranya, pelaku usaha, hotel, masyarakat, budayawan dan akademisi. Dengan melalui sistem pariwisata terpadu (siraru), diharapkan, tahun depan konsep wisata berkelanjutan banyak diterapkan di berbagai wilayah khususnya di Kota Bandung.

Pariwisata berkelanjutan atau *sustainable tourism* dinilai sebagai aspek terpenting bagi pengembangan sektor pariwisata di era kenormalan baru pascapandemi COVID-19. Aspek tersebut diterapkan seiring kebijakan protokol kesehatan yang ditunjang oleh kesiapan-kesiapan di daerah-daerah tujuan wisata. Plt. Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenparekraf/Baparekraf, Frans Teguh menjelaskan, pariwisata berkelanjutan akan menjadi sebuah pilihan dan konsekuensi dari bagian pengembangan pariwisata, setelah pandemi COVID-19. Menurutnya, ke depan yang perlu diperkuat yakni bagaimana pariwisata berpusat kepada manusia atau *people-centered tourism* atau *community based tourism* yang mencakup peningkatan diversifikasi produk, pelayanan sesuai dengan kebutuhan perilaku masyarakat, pola pelayanan serta upaya meningkatkan kekuatan kearifan lokal yang akhirnya menjadi unique selling point. Hal itu yang harus dijaga, dirawat dan dikelola dengan dukungan kualitas sumber daya manusia ke depan. Selain itu perlu diterapkan nilai keberlanjutan domestik seperti resiliens dan kearifan lokal, serta pariwisata yang berkeselimbangan.

Untuk menerapkan pariwisata berkelanjutan lebih luas dibutuhkan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan pariwisata. Saat ini, para pihak pariwisata memiliki momentum untuk untuk membenahi, menata dan menyiapkan strategi dan langkah *reopening* atau *rebound* pemulihan pariwisata. Pemerintah menawarkan konsep dan strategi untuk mengaplikasikan skema dan pola pengembangan pariwisata berkelanjutan dengan parameter dan indikatornya secara komprehensif termasuk

dalam upaya penanganan krisis dan aspek kebersihan, kesehatan dan keselamatan. Program pariwisata berkelanjutan bukan hanya kerja sektoral, tapi harus menyeluruh baik masyarakat, pemerintah, akademisi, dan lainnya, atau yang biasa kita sebut pentahelix. Berbagai disiplin ilmu dan stakeholder harus bekerja bersama-sama dan memperbaiki aspek tata kelola, aspek ekonomi, sosia budaya dan lingkungan untuk tmeningkatkan daya saing, reputasi dan kepercayaan publik serta nilai keberlanjutan sumber daya kepariwisataan. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kota Bandung selama pandemi covid 19

LANDASAN TEORI

Pariwisata

Kebijakan pariwisata memberikan filsafat dasar untuk pembangunan dan menentukan arah pengembangan pariwisata di destinasi tersebut untuk masa depan. Sebuah destinasi dapat dikatakan akan melakukan pengembangan wisata jika sebelumnya sudah ada aktivitas wisata. Dalam pelaksanaan pengembangan, perencanaan merupakan factor yang perlu dilakukan dan dipertimbangkan. Menurut Sunaryo (2013) pengembangan kepariwisataan membawa banyak manfaat dan keuntungan. Oleh karena itu pembangunan kepariwisataan diarahkan pada peningkatan pariwisata menjadi sector andalan yang mampu mengalahkan kegiatan ekonomi termasuk kegiatan sector lain yang terkait. Sehingga lapangan kerja, pendapatan masyarakat, pendapatan daerah dan pendapatan Negara serta penerimaan devisa meningkat melalui usaha pengembangan dan pendayagunaan berbagai potensi kepariwisataan.

Menurut Kodhyat (2012) pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ketempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan atau kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu. Sedangkan Gamal (2012), pariwisata didefinisikan sebagai bentuk. suatu



proses kepergian sementara dari seorang, lebih menuju ketempat lain diluar tempat tinggalnya. Dorongan kepergiannya adalah karena berbagai kepentingan baik karena kepentingan ekonomi, sosial, budaya, politik, agama, kesehatan maupun kepentingan lain. Selanjutnya Burkart dan Medlik (2013) menjelaskan pariwisata sebagai suatu transformasi orang untuk sementara dan dalam waktu jangka pendek ketujuantujuan di luar tempat di mana mereka biasanya hidup dan bekerja, dan kegiatankegiatan mereka selama tinggal di tempat-tempat tujuan itu. Sedangkan menurut Undang - Undang RI nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan dijelaskan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara.

Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism)

Konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan berawal dari konsep pembangunan berkelanjutan. Secara umum, konsep pembangunan mencakup usaha untuk mempertahankan integritas dan diversifikasi ekologis, memenuhi kebutuhan dasar manusia, terbukanya pilihan bagi generasi yang akan datang, pengurangan ketidakadilan, dan peningkatan penentuan nasib sendiri bagi masyarakat setempat (Picard 2016). Pariwisata dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan, industri pariwisata, dan kebutuhan masyarakat lokal saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembangunan berkelanjutan dalam tujuannya harus menganut tiga prinsip dasar, yaitu: (1) Kelangsungan ekologi; (2) Kelangsungan sosial budaya; dan (3) Kelangsungan ekonomi dimana pembangunannya mampu memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya.

Menurut WTO dalam agenda 21 untuk industri travel dan pariwisata menyatakan: *Sustainable tourism development* memenuhi kebutuhan wisatawan dan masyarakat daerah tujuan wisata sambil melindungi dan mengembangkan peluang pada masa depan. Dipandang sebagai sesuatu yang mengarahkan ke manajemen, seluruh sumber daya dengan cara dimana kebutuhan ekonomi, sosial dan estetika dapat dipenuhi bersama integritas budaya, proses-proses ekologi yang esensial, diversitas biologi dan sistem-sistem mendukung kehidupan tetap dipelihara. Lima hal yang harus diperhatikan dalam pariwisata berkelanjutan menurut konsep Pitana (2016), yakni: (1) Pertumbuhan ekonomi yang sehat; (2) Kesejahteraan masyarakat lokal; (3) Tidak merubah struktur alam, dan melindungi sumber daya alam; (4) Kebudayaan masyarakat yang tumbuh secara sehat; (5) Memaksimalkan kepuasan wisatawan dengan memberikan pelayanan yang baik karena wisatawan pada umumnya mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan.

Pariwisata berkelanjutan dikatakan berkualitas apabila dapat menyediakan sebuah pengalaman yang berkualitas bagi pengunjung, sementara itu juga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal dan melindungi kualitas lingkungan. Pariwisata yang menjamin kelangsungan sumber daya alam dan budaya masyarakat lokal dengan pengalaman yang memuaskan bagi pengunjung. Erdington and Smith dalam Nasikun (2011) menyebutkan bahwa ciri khas dari pembangunan pariwisata berkelanjutan adalah bentuk pariwisata yang memegang teguh konsistensi terhadap nilai alam, sosial dan budaya masyarakat yang dapat memberikan kepuasan positif dan bernilai pada masyarakat lokal maupun wisatawan ketika berinteraksi dan bertukar pengalaman.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mendeskripsikan secara

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems



terperinci fenomena sosial tertentu tanpa menggunakan hipotesa yang telah dirumuskan secara ketat (Singarimbun, 2013). Penelitian kualitatif mempunyai tujuan agar peneliti lebih mengenal lingkungan penelitian, dan dapat terjun langsung ke lapangan sebagai *key instrument* (instrumen kunci). Jennings (2011) menjelaskan penelitian kualitatif berhubungan dengan paradigma holistik-induktif yang menginterpretasikan permasalahan sosial dalam ranah *paradigma post modern*. Nana Syaodih Sukmadinata (2015) menyatakan bahwa penelitian kualitatif (*qualitative research*) adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendiskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok.

Data sebagai sumber dasar analisis dalam penelitian ini didapat dengan menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi (*documentary study*) yang mana berbagai data yang dianggap relevan dengan penelitian yang tengah di lakukan bersumber baik dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, laman web dan sumber referensi lainnya. Data ini kemudian akan diolah melalui tiga tahapan yang terdiri dari reduksi data, penyajian data/display dan penarikan kesimpulan Creswell (2014). Kemudian data tersebut akan dilakukan pengujian untuk menghasilkan gambaran yang real dan benar sesuai dengan kondisi yang ada melalui teknik triangulasi yang meliputi tahap check, tahap *re-check* dan tahap *cross-check* (Sugiyono, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

COVID-19 yang sudah menyebar ke seluruh provinsi di Indonesia disikapi dengan penetapan bencana nasional COVID-19 oleh pemerintah, status tersebut didasarkan kepada bayakannya warga masyarakat yang terinfeksi COVID-19, bahkan ratusan orang meninggal disebabkan oleh COVID-19 tersebut. Kondisi wabah COVID-19 diperparah dengan belum diketemukannya obat dan vaksin anti COVID19, berbagai pihak memprediksi bahwa penyebaran

COVID-19 akan berlangsung sepanjang tahun 2020. Dalam konteks pariwisata, COVID-19 yang disusul dengan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berimplikasi kepada berhentinya seluruh kegiatan pariwisata yang ada di Kota Bandung yang berimplikasi kepada kerugian ekonomi di sektor pariwisata.

Kota Bandung saat ini menjadi kota wisata unggulan yang ada di provinsi Jawa Barat, tidak heran apabila pariwisata di Kota Bandung sering direpresentasikan sebagai citra pariwisata bagi provinsi Jawa Barat yang mana banyak jenis pariwisata yang ada di provinsi Jawa Barat bisa dilihat dan dirasakan hanya dengan berkunjung ke Kota Bandung semata. Pariwisata di Kota Bandung secara empiris tidak hanya terpusat di wilayah Kota Bandung semata, tetapi di beberapa kota lainnya yang tergabung dalam wilayah Bandung Raya yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi dan Kabupaten Sumedang. Implikasi bagi sektor pariwisata yaitu secara empiris pariwisata tidak hanya dikembangkan di Kota Bandung semata, tetapi di beberapa daerah lainnya yang tergabung dalam Bandung Raya, sehingga pariwisata di Bandung tidak hanya diterjemahkan sebagai aktivitas pariwisata di Kota Bandung, tetapi juga di kota dan kabupaten yang tergabung dalam Bandung Raya, meskipun demikian Kota Bandung masih menjadi pusat pariwisata bagi kota dan kabupaten yang tergabung dalam Bandung Raya.

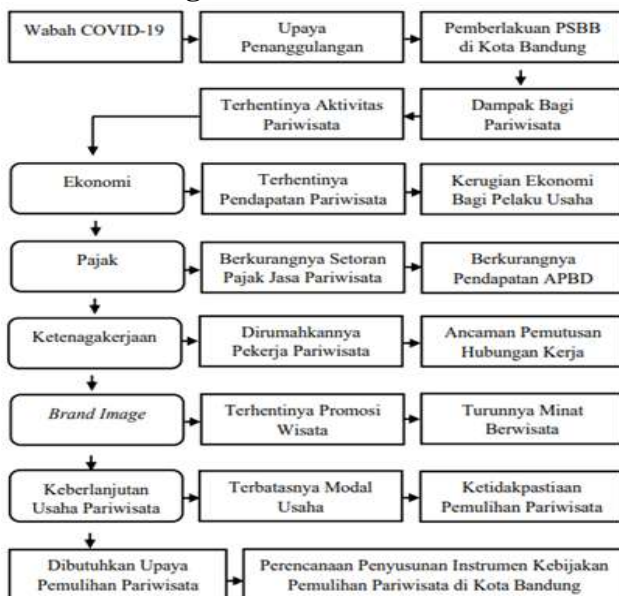
Kota Bandung memiliki banyak objek wisata yang dapat dijadikan daya tarik pariwisata bagi para wisatawan baik yang berasal dari luar negeri maupun yang berasal dari dalam negeri. Kawasan pariwisata yang ada di Kota Bandung tidak hanya terbatas kepada jenis pariwisata yang memanfaatkan sumber daya alam, tetapi juga bervariasi sampai dengan jenis pariwisata Aeronautika. Julukan Kota Bandung sebagai kota fesyen dan kota kuliner juga sudah menjadi brand image yang familiar di kalangan wisatawan yang berkunjung ke Kota Bandung yang mana banyak wisatawan dari luar kota sengaja berkunjung di akhir pekan untuk makan dan berbelanja di banyak tempat di Kota Bandung. Berbagai



Kawasan yang menunjang pariwisata di Kota Bandung sebagaimana telah dijelaskan di atas pada akhirnya menjadikan Kota Bandung sebagai kota wisata yang tidak hanya diakui secara nasional, tetapi juga sudah mendapat pengakuan dari UNESCO sebagai kota wisata dunia (Fajri & Riyanto, 2016).

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Bandung yang salah satu aturannya melarang kegiatan pariwisata di satu sisi harus didukung guna menanggulangi penyebaran COVID-19, akan tetapi di sisi lain tidak dapat dipungkiri memberikan kerugian kepada pariwisata itu sendiri yang mana semua pemangku kepentingan mulai dari pemerintah daerah, pelaku usaha sampai dengan pekerja di sektor pariwisata merasakan kerugian tersebut. Pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan Kota Bandung telah memberikan pemasukan kepada Pemerintah Kota Bandung melalui pajak jasa pariwisata, serta telah membuka lapangan pekerjaan dan menjadi sumber mata pencaharian bagi banyak masyarakat. Dengan berhentinya aktivitas pariwisata yang ada di Kota Bandung, maka dampak yang ditimbulkannya pun mencakup banyak aspek yang saling terkait satu dengan yang lainnya.

Gambar 1. Dampak Wabah COVID-19 di Kota Bandung



Sumber: Herdiana (2020)

Berdasarkan Gambar 1 di atas, setidaknya terdapat 5 (lima) aspek yang terdampak COVID-19 bagi sektor pariwisata, yaitu: Pertama, aspek ekonomi yang mana berhentinya aktivitas pariwisata di Kota Bandung secara otomatis menghentikan pemasukan dari jasa pariwisata, hal ini tentu saja memberikan kerugian ekonomi bagi para pelaku usaha pariwisata yang selama ini mendapatkan penghasilan dari sektor pariwisata. Kerugian ekonomi dari berhentinya aktivitas pariwisata berimplikasi kepada aspek lainnya dikarenakan meskipun tidak mendapatkan penerimaan dari jasa pariwisata tetapi aktivitas pengelolaan pariwisata tetap berjalan seperti pemeliharaan fasilitas pariwisata, pembayaran iuran air dan listrik, pengajihan karyawan baik yang masih bekerja maupun yang dirumahkan dan lain sebagainya. Kondisi tersebut membuat ketidakseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran bagi para pelaku usaha pariwisata, sehingga tidak menutup kemungkinan bagi para pengusaha yang mengalami kerugian besar, memiliki beban untuk mengembalikan kegiatan pariwisata (Permana, 2020).

Kedua, aspek pendapatan pajak yang mana pariwisata di Kota Bandung tahun 2019 menyumbang sebesar 740 miliar atau setara dengan 33% dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung (Andriyawan, 2019). Ketiga, aspek ketenagakerjaan merupakan aspek yang terdampak wabah COVID-19 yang mana pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara otomatis menghentikan banyak pekerjaan di sektor pariwisata. Pelaku usaha merumahkan para pekerja dengan tetap menggaji sebagaimana ketentuan peraturan pemerintah, akan tetapi tidak sedikit dari para pekerja yang dirumahkan tersebut tidak mendapatkan kepastian akan dipekerjakan kembali pasca wabah COVID-19. Keempat, brand image dalam pariwisata merupakan aspek yang penting dikarenakan adanya citra yang baik selain akan memunculkan kesan positif juga akan meningkatkan keinginan berkunjung dari para wisatawan. Kelima, keberlanjutan usaha pariwisata menjadi aspek yang harus dipertanyakan ketika aktivitas pariwisata



terhenti, apakah berbagai jenis pariwisata yang selama ini terselenggara akan tetap bertahan dan pulih pasca wabah COVID-19 atau sebaliknya ditutup dikarenakan tidak bisa melakukan proses pemulihan pasca COVID-19.

Sektor pariwisata yang terpuruk akibat pandemi Covid-19 tengah memasuki era normal baru. Perubahan paradigma tengah berlangsung dan sejumlah protokol baru akan diterapkan untuk menyambut kondisi normal baru di industri pariwisata. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio mengemukakan, sektor pariwisata yang menyerap banyak lapangan kerja sangat terpuak akibat pandemi Covid-19. Sementara sulit untuk memprediksi kapan pandemi tersebut akan berakhir. Akan tetapi, industri pariwisata harus terus berlanjut dan memasuki era normal baru. Era normal baru membawa peran baru, jalan baru, dan ekspektasi di sektor pariwisata. Digitalisasi berkembang cepat di luar dugaan. Bisnis pariwisata harus beradaptasi terhadap kondisi yang baru serta mengatur kembali strategi model bisnis agar bisa bertahan di era normal baru, dengan menyesuaikan perkembangan teknologi (Grahadyarini, 2020).

Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk melakukan inovasi dan perbaikan di sektor pariwisata. Sehingga dengan adanya perubahan tren di pariwisata global saat ini diharapkan Indonesia mampu beradaptasi. Dalam hal ini perubahan tren di pariwisata akan bergeser ke alternatif liburan yang tidak banyak orang seperti solo travel tour, virtual tourism, serta staycation dimana isu health, hygiene, dan safety akan menjadi pertimbangan utama bagi wisatawan yang ingin berwisata. Kemudian bagi para pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif harus betul-betul mengantisipasi dan tidak tergesa-gesa untuk membuka destinasi wisata agar tak ada lagi imported case yang dapat berdampak buruk pada citra pariwisata. Disamping itu media memiliki peran yang penting dalam pembentukan stigma masyarakat terutama di masa pandemi saat ini. Media menjadi salah satu pusat jembatan informasi antara pemerintah dengan masyarakat, termasuk

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems

informasi mengenai perkembangan sektor pariwisata yang seharusnya dapat menjadi harapan bagi masyarakat untuk survive dan bersiap memulai New Normal dengan protokol khusus sektor pariwisata. Namun realitanya justru banyak berita negatif yang beredar, tingginya antusiasme masyarakat dalam memandang berita panas seperti angka kematian menyebabkan media terus menggoreng isu tersebut untuk mendapat traffic penonton dengan jumlah yang tinggi, sehingga terbentuk kepanikan masyarakat yang membuat sebagian masyarakat kehilangan harapan untuk bertahan di situasi sulit seperti saat ini (Warta Ekonomi, 2020).

Pariwisata berkelanjutan akan menjadi sebuah konsekuensi dari bagian pengembangan pariwisata, setelah pandemi Covid-19 selesai. Ditutupnya destinasi wisata akibat wabah harus menjadi momentum bagi para pengelola destinasi di Tanah Air untuk dapat mengevaluasi dan menata ulang tempat wisatanya, sehingga menghadirkan kesan yang lebih baik untuk wisatawan termasuk mulai menerapkan pariwisata berkelanjutan.

Setelah pandemi berlalu akan hadir kondisi “new normal” atau tren baru dalam berwisata, yang mana wisatawan akan lebih memperhatikan protokol-protokol wisata, terutama yang terkait dengan kesehatan, keamanan, kenyamanan, *sustainable and responsible tourism*, *authentic digital ecosystem*, dan lainnya. Dalam penerapan pariwisata berkelanjutan terdapat pedoman-pedoman yang dikeluarkan oleh *Global Sustainable Tourism Council*. Indonesia juga secara aktif berkoordinasi dengan UNWTO hingga terbentuknya ISTC. Bahkan pemerintah juga telah menyusun pedoman dalam penerapan pariwisata berkelanjutan melalui Permenpar Nomor 14 tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Kemenparekraf pun telah memiliki *framework* dan *action plan*, hingga sertifikasi yang bekerja sama dengan universitas. Usaha-usaha tersebut diharapkan dapat menumbuhkan sustainable tourism



destination di berbagai daerah Tanah Air. Banyak penggiat pariwisata, pelaku desa wisata, serta komunitas yang telah berhasil menerapkan pariwisata berkelanjutan sehingga dapat memberikan nilai tambah dalam perkembangan ekonomi maupun pengembangan secara umum.

Kerja pariwisata berkelanjutan bukan hanya kerja sektoral, tapi harus menyeluruh baik masyarakat, pemerintah, akademisi dan lainnya, atau yang biasa disebut pentahelix. Berbagai disiplin ilmu harus bekerja bersama-sama dan memperbaiki pendekatan-pendekatan kita untuk tidak hanya meningkatkan daya saing tapi juga daya keberlanjutan dari kegiatan kepariwisataan. Pariwisata berkelanjutan akan menjadi peluang yang sangat besar ke depan, terutama pascapandemi, karena selain menjadi kebutuhan wisatawan dari sisi investasi juga tidak terlalu besar. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendorong masyarakat Indonesia untuk memanfaatkan kearifan lokal di daerah masing-masing sebagai upaya membangun pariwisata berkelanjutan di era adaptasi kebiasaan baru.

Urgensi pemulihan pariwisata sebagaimana dijelaskan di atas membutuhkan suatu perencanaan yang disusun secara baik agar dalam proses pelaksanaan pemulihan pariwisata dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pemerintah dalam konteks pemulihan pariwisata memegang peran yang penting sebagai institusi resmi yang berwenang menyusun dan menetapkan kebijakan rencana pemulihan pariwisata, meskipun demikian berbagai pihak yang terlibat dalam pariwisata harus turut dilibatkan, mengingat keberhasilan pemulihan pariwisata merupakan kerjasama multi-aktor yang menuntut kerjasama dan sinergitas yang baik antar pemangku kepentingan. Instrumen kebijakan yang lahir sebagai output perencanaan pemulihan pariwisata di Kota Bandung merupakan hasil kajian yang dilakukan oleh 3 (tiga) pihak yang dalam hal ini pihak pertama yaitu Pemerintah Kota Bandung sebagai otoritas

yang akan mengesahkan instrumen kebijakan pemulihan pariwisata, pihak kedua yaitu pelaku usaha dalam pariwisata yang ada di Kota Bandung yaitu perusahaan jasa pariwisata dan pengusaha pariwisata baik perorangan maupun berasal dari kelompok masyarakat dan pihak ketiga yaitu para pemerhati pariwisata dan akademisi yang mana kontribusi pemikirannya dapat dijadikan input penyusunan kebijakan pemulihan pariwisata meskipun secara empiris tidak terkait langsung dalam penyelenggaraan pariwisata. Upaya pemulihan pariwisata pasca wabah COVID-19 tidak hanya melalui penyusunan instrumen kebijakan semata, tetapi juga harus diimbangi dengan adanya perbaikan secara internal dalam organisasi Pemerintah Kota Bandung guna memastikan bahwa pemulihan pariwisata tidak hanya ditujukan secara eksternal bagi para pelaku usaha pariwisata, tetapi juga meliputi upaya perbaikan secara internal (Herdiana, 2020).

Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan (*Sustainable Tourism Development*) merupakan sebuah isu dan telah menjadi visi pengembangan pariwisata di dunia saat ini dan masa datang. Hal ini secara tegas telah disampaikan oleh UNWTO dengan merekomendasikan pedoman dan manual penerapan pembangunan pariwisata secara berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan merupakan pedoman dasar bagi pengelola pariwisata yang berkaitan dengan lingkungan alam, lingkungan binaan, dan lingkungan sosial budaya agar dapat dimanfaatkan dalam pembangunan. Hal ini dimaksudkan agar upaya komersialisasi (ekonomi) selaras dengan upaya konservasi sumber daya agar tetap dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang. Disamping itu, perlunya pelaksanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan juga terkait dengan semakin meningkatnya apresiasi konsumen yang semakin tinggi dan menuntut suatu destinasi wisata untuk memperhatikan keseimbangan kualitas lingkungan dan sosial budaya dengan pengembangan ekonomi.



Untuk menumbuhkan daya saing pada penerapan konsep pariwisata berkelanjutan dalam pengembangan pariwisata Kota Bandung, secara operasional dilakukan dengan menggunakan kombinasi *resource-based approach* dan *market-based approach*, dengan pemahaman bahwa secara umum *resource-based approach* dikembangkan dengan mengadopsi pemahaman akan kecenderungan pasar dan lingkungan strategis. Implementasi Konsep Pariwisata Berkelanjutan di Kota Bandung dikembangkan dengan kesadaran bahwa pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang memiliki ciri pengembangan melalui ketersediaan dan kemampuan sumberdaya pariwisata, kemampuan wilayah, pengorganisasian, dan masyarakat.

Pembangunan pariwisata melalui pendekatan ini diyakini akan lebih dapat diterima oleh masyarakat dan memanfaatkan lingkungan secara bertanggung jawab, dengan tetap memiliki manfaat ekonomi serta menciptakan *multiplier effect* yang tinggi. Oleh sebab itu, pengembangan pariwisata di Kota Bandung perlu mempertimbangkan secara cermat faktor-faktor yang saling berkait dan yang diperkirakan akan menjadi faktor pengganggu. Dalam mengembangkan Kota Bandung sebagai destinasi pariwisata, tidak hanya aspek daya tarik sebuah hal yang paling esensial namun aspek-aspek lain perlu diperhatikan.

Sustainable Development merupakan prinsip bersama dari sebuah pembangunan yang perlu untuk diterapkan dalam setiap perencanaan pembangunan. Dari pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan peran para wisatawan dalam mempromosikan sebuah destinasi wisata. Pembangunan berkelanjutan bukan hanya sebagai prinsip pembangunan, namun juga sebagai sebuah media promosi pariwisata. Dengan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan bertujuan agar para wisatawan puas dengan kegiatan berwisata, juga sebagai penarik untuk wisatawan internasional untuk mau berkunjung ke Kota Bandung. Pariwisata berkelanjutan bukan hanya sebagai prinsip pembangunan namun dapat memberikan

dampak yang baik untuk promosi pariwisata kepada masyarakat lokal maupun internasional untuk kunjungan yang lebih meningkat. Salah satunya adalah pembangunan yang baik dan memperhatikan keberlanjutan akan menghasilkan kenyamanan dari wisatawan sehingga mereka puas terhadap kunjungan mereka dan akan melakukan kunjungan ulang.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa sektor pariwisata yang terpuruk akibat pandemi Covid-19 tengah memasuki era normal baru. Perubahan paradigma tengah berlangsung dan sejumlah protokol baru akan diterapkan untuk menyambut kondisi normal baru di industri pariwisata. Pariwisata berkelanjutan akan menjadi sebuah konsekuensi dari bagian pengembangan pariwisata, setelah pandemi Covid-19 selesai. Ditutupnya destinasi wisata akibat wabah harus menjadi momentum bagi para pengelola destinasi di Tanah Air untuk dapat mengevaluasi dan menata ulang tempat wisatanya, sehingga menghadirkan kesan yang lebih baik untuk wisatawan termasuk mulai menerapkan pariwisata berkelanjutan. Dalam penerapan pariwisata berkelanjutan terdapat pedoman-pedoman yang dikeluarkan oleh *Global Sustainable Tourism Council*. Penerapan pariwisata berkelanjutan juga diatur melalui Permenpar Nomor 14 tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Kerja pariwisata berkelanjutan bukan hanya kerja sektoral, tapi harus menyeluruh baik masyarakat, pemerintah, akademisi dan lainnya, atau yang biasa disebut pentahelix. Untuk menumbuhkan daya saing pada penerapan konsep pariwisata berkelanjutan dalam pengembangan pariwisata Kota Bandung, secara operasional dilakukan dengan menggunakan kombinasi *resource-based approach* dan *market-based approach*, dengan pemahaman bahwa secara umum *resource-based approach* dikembangkan dengan mengadopsi pemahaman akan kecenderungan pasar dan lingkungan strategis.



DAFTAR PUSTAKA

- [1] Andriyawan, Dea. 2019. "Sektor Pariwisata Sumbang 33% PAD Kota Bandung." Retrieved April 26, 2020, from <https://bandung.bisnis.com/read/20191112/549/1169479/sektor-pariwisatasumbang-33-pad-kota-bandung>.
- [2] Burkart and Medlik. 2013. *Tourism Pas, Present, and Future*, 18nd edition. London: Heinemann.
- [3] Creswell, John W. 2014. *Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta : pustaka pelajar.
- [4] Fajri, Khoirul dan Nova Riyanto. 2016. "Strategi Pengembangan Destinasi Pariwisata Kota Bandung Dalam Meningkatkan Tingkat Kunjungan Wisatawan Asal Malaysia." *Tourism Scientific Journal 1(2):167-83*.
- [5] Gamal, Suwanto, 2012. *Dasar-Dasar Pariwisata. Edisi ke VII*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- [6] Grahadyarini, BM Lukita.2020. Pariwisata Bersiap Hadapi Normal Baru Pasca Pandemi Covid 19. <https://bebas.kompas.id/baca/bebas-akses/2020/05/16/pariwisatabersiap-hadapi-normal-baru/>, diakses 22 Juni 2020.
- [7] Herdiana, Dian. 2020. Rekomendasi Kebijakan Pemulihan Pariwisata Pasca Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Bandung. *JUMPA Volume 7, Nomor 1, Juli 2020*.
- [8] Jennings, GL. 2011. *Exercise and hypertension*. Philadelphia: Elsevier Saunders
- [9] Keppres 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional.
- [10] Kodhyat, H. 2012. *Sejarah Pariwisata Dan Perkembangannya Di Indonesea. Cetakan ke 7*. Jakarta: Grasindo.
- [11] Nana Syaodih Sukmadinata. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- [12] Nasikun. 2011. "Model Pariwisata Pedesaan: Pemodelan Pariwisata Pedesaan untuk Pembangunan Pedesaan yang Berkelanjutan". dalam *Prosiding Pelatihan dan Lokakarya Perencanaan Pariwisata Berkelanjutan*. Bandung: Institut Teknologi Bandung.
- [13] Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2016, tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan
- [14] Permana, Adi. 2020. "Dr. Nuning Nuraini bersama Tim SimcovID Sampaikan Kajian Ilmiah Terbaru Pandemi COVID-19 di Indonesia." Retrieved April 14, 2020, from <https://www.itb.ac.id/news/read/57461/home/dr-nuning-nuraini-bersama-timsimcovid-sampaikan-kajian-ilmiah-terbaru-pandemi-covid-19-di-indonesia>. diakses 22 Juni 2020
- [15] Permenpar Nomor 14 tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan.
- [16] Picard, Michel. 2016. *Bali: Pariwisata Budaya dan Budaya Pariwisata. Terjemahan oleh Jean Couteau dan Warih Wisatsana. Edisi ke XII*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia
- [17] Pitana, I Gde. dan Surya Diarta, I Ketut. 2013. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- [18] Singarimbun, M. 2013. *Metode penelitian Survei. Edisi ke XI*, Jakarta. LP3ES.
- [19] Sugianto, Danang. 2020. "Geger Corona, Kok RI Malah Tarik Banyak Wisman?." Retrieved April 28, 2020, from <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d4921764/geger-corona-kok-ri-malah-tarik-banyak-wisman>. diakses 22 Juni 2020
- [20] Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Reseach and Development*. Bandung: Alfabeta.
- [21] Sunaryo, Bambang. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media
- [22] Surat Edaran Walikota Bandung Tertanggal 31 Maret 2020 Tentang Himbauan untuk Sementara Tidak Melaksanakan Kegiatan Operasional Jasa Usaha Pariwisata dalam



Upaya Kewaspadaan Terhadap Penularan COVID-19.

- [23] Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/259/2020.
- [24] Undang - Undang RI nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan
- [25] Warta Ekonomi. 2020. Jokowi: Sektor Pariwisata Mulai Siapkan Transisi ke Tatanan Baru.
<https://www.wartaekonomi.co.id/read287463/jokowi-sektorpariwisata-mulai-siapkan-transisike-tatanan-baru>, diakses 22 Juni 2020.
- [26] Yurianto, Achmad, Kirana Pritasari, Bambang Wibowo, and Siswanto. 2020. Pedoman Penanganan Cepat Medis Dan Kesehatan Masyarakat COVID-19 Di Indonesia. Jakarta: Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN